

PENGARUH *LEVERAGE*, DANA PERIMBANGAN, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Stithaprajna Tjahjono Putri

prajnastitha@gmail.com

Maswar Patuh Priyadi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

Local government financial performance is one of the considerations used in order to find out how the government runs its autonomy. Therefore, there are some factors which affect its performance, i.e leverage, fiscal balance fund, and capital expenditure. This research aimed to find out how leverage which was referred to Debt to Equity Ratio, fiscal balance fund, and capital expenditure affected local government financial performance of districts/cities in East Java province during 2016-2019. The research was descriptive-qualitative, with its object through data or collected samples. Moreover, the data collection technique used purposive sampling, in which the sample was based on criteria given. In line with, there were 35 districts/cities in East Java province as the sample. Furthermore, the data were secondary in the form of Budget Realization Report and Balance Sheet during 2016-2019. Additionally, the data analysis technique used multiple linear regression with SPSS 25. The research result concluded that leverage as well as capital expenditure did not affect local government financial performance. On the other hand, fiscal balance fund had a positive and significant effect on local government financial performance.

Keywords: leverage, fiscal balance fund, capital expenditure, local government financial performance

ABSTRAK

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu alat ukur yang digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonominya. Beberapa faktor yang mempengaruhi dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah yaitu *leverage*, dana perimbangan dan belanja modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *leverage* yang diprosikan dengan *debt to equity ratio*, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur periode 2016-2019. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yaitu penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dan berfungsi untuk memberi gambaran objek yang akan diteliti melalui data atau sampel yang terkumpul. Sampel pada penelitian ini diperoleh dengan metode *purposive sampling* dan mendapatkan sampel 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang sesuai dengan kriteria yang sudah ditentukan. Data yang digunakan berupa data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Neraca periode 2016-2019. Pengujian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda dengan program SPSS 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *leverage* dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Kata Kunci: *leverage*, dana perimbangan, belanja modal, kinerja keuangan pemerintah daerah

PENDAHULUAN

Secara umum negara Indonesia merupakan negara yang memiliki kondisi geografis yang luas dan memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Berkembangnya jumlah penduduk setiap tahunnya akan berdampak pada pemerintah yang akan semakin sulit mengatur pemerintahan yang ada di daerah-daerah. Maka dari itu pemerintah harus membuat suatu sistem yang mampu berjalan dengan efektif dan efisien agar aspirasi masyarakat cepat tersampaikan, salah satunya dengan memberikan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban setiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Munculnya otonomi daerah tidak luput dengan adanya desentralisasi, yaitu penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat ke kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan.

Secara sederhana, otonomi daerah dapat diartikan adanya terjadi pengelolaan keuangan daerah dengan pemenuhan azas akuntabilitas dan transparansi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka pemerintah harus melakukan evaluasi yang berkala atas capaian pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu, evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pengukuan kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Fahmi (2012) kinerja keuangan merupakan analisis yang dilakukan untuk melihat bagaimana suatu entitas melaksanakan tujuan entitasnya dengan menggunakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Pengukuran kinerja dapat bersumber dari informasi financial seperti laporan keuangan yang diukur berdasarkan anggaran yang telah dibuat (Mardiasmo, 2009). Dan data tersebut dapat menjadi acuan untuk peningkatan program selanjutnya guna menghasilkan pelayanan publik yang lebih berkualitas.

Kinerja keuangan pemerintah juga dapat dipengaruhi oleh otonomi daerah. Hal tersebut dikarenakan otonomi daerah yang terjadi dimasing-masing daerah memiliki potensi sumber daya manusia dan kekayaan alam yang berbeda sehingga pendapatan yang diterima oleh setiap daerah juga berbeda. Akibatnya kinerja keuangan tiap daerah akan mengalami perbedaan antar satu dengan lainnya. Dan saat menerapkan otonomi daerah, tidak jarang pemerintah daerah mengalami kekurangan dana untuk membiayai kebutuhan daerahnya sendiri. Karena hal tersebut terkadang pemerintah daerah memiliki hutang kepada pihak eksternal untuk memenuhi kebutuhan daerahnya. Perwitasari (2010), menyatakan bahwa jika suatu pemerintah daerah memiliki *leverage* yang tinggi maka kinerja pemerintah daerah tersebut cenderung buruk karena memiliki sumber pendanaan utamanya dari pihak eksternal. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sumarjo (2010) dengan judul "Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia) yang menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini dapat terjadi karena semakin besar *leverage* suatu pemerintah daerah maka pengawasan yang dilakukan kreditor akan semakin ketat.

Dana perimbangan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi apakah suatu daerah dapat menerapkan otonomi daerah yang baik atau tidak. Karena dana perimbangan merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan yang dilakukan daerah agar desentralisasi yang dilakukan dapat berjalan dengan baik. Namun semakin besar dana perimbangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah maka akan menjadikan daerah semakin bergantung kepada pemerintah pusat. Hal tersebut dapat mengakibatkan suatu daerah tidak dapat menjadi daerah yang mandiri secara finansial. Menurut Julitawati *et al.*, (2012) dana perimbangan dapat mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, karena dana yang diberikan pemerintah pusat ke pemerintah daerah akan memperlihatkan pemerintah daerah semakin bergantung kepada pemerintah pusat sehingga membuat kinerja pemerintah daerah menurun. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyanti (2016) yang mempunyai kesimpulan jika secara simultan dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bintan.

Kemudian selain *leverage* dan dana perimbangan, belanja modal juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Belanja modal merupakan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai proyek-proyek guna menunjang kualitas pelayanan publik yang akan diberikan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah. Walaupun demikian belanja modal tidak dilakukan untuk mencari profit namun dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu kegiatan belanja

modal yang dapat menghasilkan sumber keuangan yaitu dengan adanya pembangunan infrastruktur berupa fasilitas umum. Jika pembangunan infrastruktur di suatu daerah berkembang pesat maka akan berdampak pada pertumbuhan pendapatan daerah yang merupakan proyeksi dari kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Antari dan Sedana (2018), dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah” memberikan kesimpulan bahwa belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015. Hal ini memberi arti bahwa belanja modal yang dilakukan belum sepenuhnya mampu memberi kontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten/Kota Provinsi Bali tahun 2011-2015.

Dari seluruh penelitian terdahulu yang memiliki variabel-variabel independen *Leverage*, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal dan variabel dependen berupa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, penelitian ini dilakukan karena masih adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *leverage*, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini dilakukan juga untuk melihat seberapa besar pengaruh yang dihasilkan masing-masing variabel terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Dengan demikian maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut: (1) Apakah *Leverage* (LEV) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?, (2) Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, (3) Apakah Belanja Modal (BM) berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?. Sedangkan tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk: (1) Untuk menguji pengaruh *Leverage* (LEV) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, (2) Untuk menguji pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, (3) Untuk menguji pengaruh Belanja Modal (BM) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

TINJAUAN TEORITIS

Agency Theory

Menurut Supriyono (2018) teori keagenan adalah konsep yang menjelaskan bagaimana hubungan antara principle dengan agen, dimana principle merupakan pihak yang memberi wewenang dan akan memberikan seluruh kewenangannya kepada agen untuk mengambil keputusan dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh principle. Menurut Adhana (2019) teori keagenan dalam sektor publik menjelaskan bahwa pihak yang secara langsung terlibat dalam penyusunan rancangan anggaran cenderung bersifat memanfaatkan semaksimal mungkin utilitasnya dengan mengalokasikan sumber daya didalam anggaran. Eksekutif yang mengusulkan rancangan anggaran sekaligus berperan sebagai pelaksana yang akan berupaya agar jumlah anggaran tersebut lebih dimaksimalkan. Akan tetapi, legislatif yang merupakan wakil rakyat menggunakan anggaran tersebut untuk alat pengawasan. Legislatif mampu merubah jumlah anggaran serta dapat merubah distribusi belanja. Di dalam organisasi sektor publik, teori keagenan sudah mulai dipraktikkan. Hal ini dapat dibuktikan dengan diberikannya kebijakan otonomi dan desentralisasi oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2004:67), Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah untuk mendapatkan dana pembangunan guna memenuhi belanja daerah dan usaha daerah agar dapat memperkecil ketergantungan dalam mendapatkan dana dari pemerintah tingkat atas (subsidi). Pemerintah yang sudah menerapkan otonomi daerah mengharuskan daerah untuk mencari alternatif lain yang dapat digunakan sebagai bentuk inovasi guna meningkatkan pendapatan daerah. Peningkatan PAD harus dilakukan Pemerintah Daerah agar mampu membiayai kebutuhan daerah masing-

masing sehingga Pemerintah Daerah tidak selalu bergantung kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat menjadi mandiri. Semakin besar PAD, maka semakin besar pula kemampuan Pemerintah Daerah untuk bertanggungjawab atas biaya rumah tangga Pemerintah Daerah tersebut.

Leverage

Menurut Halim dan Kusufi (2012) *leverage* adalah pengorbanan ekonomi untuk menyerahkan aset atau jasa kepada entitas lain dimasa yang akan datang. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardani (2012) *leverage* merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas. Dan pada akuntansi sektor publik, *leverage* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat ketergantungan suatu pemerintah daerah dalam membiayai aset daerahnya. *Leverage* merupakan gambaran perbandingan antara total kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan total kewajiban. Dalam sektor publik, *leverage* atau rasio utang dapat digunakan kreditor untuk mengukur seberapa mampu pemerintah daerah untuk membayar utang yang dimiliki

Dana Perimbangan

Menurut Halim (2008) dana perimbangan adalah dana yang didapatkan dari APBD yang akan dialokasikan ke pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan daerah tersebut. Dana perimbangan bisa juga diartikan sebagai sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, yaitu untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Dana perimbangan dimaksudkan untuk mendanai kebutuhan pemerintah daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintah antar daerah.

Belanja Modal

Belanja modal adalah belanja yang digunakan untuk pembelian atau pembangunan aset yang bersifat tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) tahun (Mahsun *et al.*, 2011). Belanja modal merupakan belanja yang dilakukan pemerintah daerah yang memiliki manfaat lebih dari satu anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah yang selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan suatu daerah dalam menjalankan otonomi daerahnya (Halim, 2007). Menurut Halim (2008) terdapat enam rasio yang dapat digunakan untuk dijadikan tolak ukur dalam kinerja keuangan pemerintah daerah yaitu: rasio pertumbuhan, rasio efektivitas, rasio efisiensi, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), rasio kemandirian, dan rasio aktifitas.

Perumusan Hipotesis

Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Leverage merupakan perbandingan antara utang dan modal. *leverage* merupakan proporsi total hutang terhadap rata-rata ekuitas. Menurut Perwitasari (2010) jika hasil *leverage* yang dimiliki suatu entitas semakin besar maka entitas tersebut memiliki kinerja yang buruk. Hal ini menunjukkan bahwa entitas tersebut membutuhkan dana dari pihak eksternal dan tidak mampu membiayai biaya operasionalnya sendiri. Penelitian yang dilakukan oleh Satria dan Sari (2018) menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan

pemerintah daerah kota Lhokseumawe. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : *Leverage* berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Dana perimbangan adalah dana yang sumbernya berasal dari pendapatan APBN yang akan dialokasikan kepada daerah sebagai komitmen antara pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi fiskal. Dana perimbangan disebut juga transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) daerah. Penelitian yang dilakukan Ayu (2018) menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di Jawa Barat. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2016) yang memiliki kesimpulan jika dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah guna memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat baik memberi manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian yang dilakukan Astiti dan Mimba (2016) menunjukkan hasil bahwa belanja modal berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Andirfa *et al.*, (2016) yang memiliki kesimpulan bahwa belanja modal secara parsial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis dapat diurumuskan sebagai berikut:

H₃ : Belanja Modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek Penelitian)

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian secara deskriptif yaitu penelitian yang menggunakan pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab status terakhir dari subyek penelitian (Kuncoro, 2004). Populasi dalam penelitian ini merupakan Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan Laporan Hasil Pemeriksaan Realisasi Anggaran dan Laporan Hasil Pemeriksaan Posisi Keuangan periode 2016-2019.

Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan cara *purposive sampling*, yaitu dengan pengambilan sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian. Adapun kriteria yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: (1) Kabupaten dan Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur, (2) Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur yang telah mempublikasikan Laporan Hasil Pemeriksaan Realisasi Anggaran dan Laporan Hasil Pemeriksaan Posisi Keuangan pada tahun 2016-2019.

Teknik Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang secara langsung diperoleh peneliti ataupun data yang diperoleh melalui subjek penelitian dan diolah langsung oleh peneliti, seperti hasil wawancara dari subjek penelitian (Sugiyono, 2010). Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data Laporan Hasil Pemeriksaan Realisasi Anggaran dan Laporan Hasil Pemeriksaan Posisi Keuangan pada tahun 2016-2019 Kabupaten/Kota Jawa Timur yang dapat diperoleh dari

Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Timur. Dan penelitian ini menggunakan data *time series* dalam rentang waktu 4 tahun yaitu tahun 2016-2019.

Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Variabel

Variabel penelitian adalah suatu sifat atau nilai dari orang, kegiatan, ataupun obyek yang mempunyai variasi tertentu untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya oleh peneliti (Sugiyono, 2012:61). Penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi variabel lainnya, sedangkan variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel independen, yaitu: *leverage*, dana perimbangan, dan belanja modal. Sedangkan variabel dependennya yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah.

Definisi Operasional Variabel

Leverage

Menurut Kusumawardani (2012) *Leverage* (LEV) merupakan perbandingan antara utang dan modal. *Leverage* dapat digunakan untuk menggambarkan modal sendiri dalam mendanai semua kebutuhan pemerintahannya dibandingkan berapa utang Pemerintah Daerah dari pihak eksternal. LEV dirumuskan sebagai berikut:

$$LEV = \frac{Debt}{Equity}$$

Dana Perimbangan

Dana Perimbangan (DP) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah guna membantu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka agar terlaksananya pelaksanaan desentralisasi. Menurut PP Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 besarnya dana perimbangan dapat dihitung dengan rumus berikut ini:

$$\text{Dana Perimbangan} = \text{Dana Bagi Hasil} + \text{Dana Alokasi Umum} + \text{Dana Alokasi Khusus}$$

Belanja Modal

Menurut Darise (2008:141) belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pengadaan, pembelian atau pembangunan aset tetap berwujud yang memiliki nilai manfaat lebih dari dua belas bulan. Menurut Sari (2017) belanja modal dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Belanja Modal} = \text{Belanja Modal Tanah} + \text{Belanja Modal Peralatan dan Mesin} + \text{Belanja Modal Gedung dan Bangunan} + \text{Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan}$$

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Sucipto (2007) kinerja keuangan pemerintah daerah adalah suatu pencapaian dari hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi belanja daerah dan penerimaan daerah dengan menggunakan indikator yang ditetapkan melalui suatu ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Pengukuran kinerja keuangan daerah dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan rasio pertumbuhan PAD. Rasio pertumbuhan PAD dapat digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk meningkatkan dan mempertahankan keberhasilan yang telah dicapai dari periode sebelumnya ke periode berikutnya. Penghitungan rasio pertumbuhan terhadap kinerja keuangan dalam penelitian ini yaitu:

$$\text{Rasio Pertumbuhan PAD} = \frac{PAD_1 - PAD_0}{PAD_0}$$

Keterangan:

PAD t_0 : tahun sebelumnya

PAD t_1 : tahun akhir

Teknis Analisis Data

Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif menurut Ghozali (2016:19) adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa suatu data dengan memberikan sebuah gambaran yang telah terkumpul dan dapat dilihat dari nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, dan lain-lain.

Analisis Regresi Linier Berganda

Regresi linier berganda merupakan data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis regresi (Ghozali, 2016). Berikut ini bentuk persamaan yang digunakan:

$$KKPD = \alpha + \beta_1 LEV + \beta_2 DP + \beta_3 BM + e$$

Keterangan:

KKPD : Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

α : konstanta

β : koefisien regresi

LEV : *Leverage*

DP : Dana Perimbangan

BM : Belanja Modal

e : *error*

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Uji Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif adalah uji untuk memberikan gambaran suatu data dari setiap variabel penelitian. Statistik deskriptif akan menunjukkan nilai *minimum* (terendah), *maximum* (tertinggi), *mean* (nilai rata-rata), serta standar deviation dari hasil data perhitungan (Ghozali, 2016). Pada penelitian ini, analisis deskriptif akan digunakan untuk menjelaskan tentang variabel independen yang terdiri dari *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), dana perimbangan, dan belanja modal, serta variabel dependennya yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah yang diproksikan dengan Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berikut hasil uji statistik deskriptif yang tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1
Hasil Analisis Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LEV	140	0,00	0,06	0,0085	0,01010
DP	140	26,98	28,97	27,9226	0,39423
BM	140	25,51	28,64	26,6854	0,55217
KKPD	140	-0,39	0,63	0,1026	0,18590
Valid N (listwise)	140				

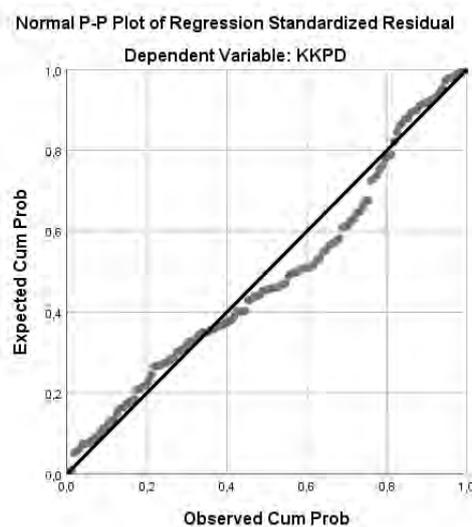
Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada Tabel 1 diketahui bahwa variabel *Leverage* (LEV) dapat diketahui bahwa hasil menunjukkan nilai minimum sebesar 0,00 yang dimiliki oleh beberapa Kabupaten/Kota dan nilai maksimum sebesar 0,06 yang dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan dan Banyuwangi, serta menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,0085 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,01010. Kemudian untuk variabel Dana Perimbangan (DP) dapat diketahui bahwa hasil menunjukkan nilai minimum sebesar 26,98 dimiliki oleh Kota Mojokerto pada tahun 2017 dan nilai maksimum sebesar 28,97 yang dimiliki oleh Kabupaten Bojonegoro pada tahun 2018, serta menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 27,9226 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,39423. Kemudian untuk variabel Belanja Modal (BM) dapat diketahui bahwa hasil menunjukkan nilai minimum sebesar 25,51 yang dimiliki oleh Kota Mojokerto pada tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar 28,64 yang dimiliki oleh Kota Surabaya pada tahun 2019, serta menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 26,6854 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,55217. Kemudian pada variabel Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD) dapat diketahui bahwa hasil menunjukkan nilai minimum sebesar -0,39 dimiliki Kabupaten Bangkalan pada tahun 2018 dan nilai maksimum sebesar 0,63 yang dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan pada tahun 2017, serta menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 0,1026 dengan nilai standar deviasi sebesar 0,18590.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan uji yang bertujuan untuk menguji nilai residual dalam sebuah model regresi memiliki distribusi yang normal atau tidak pada setiap variabel independen dan dependen. Model regresi yang baik adalah data yang terdistribusi secara normal atau yang mendekati normal. Hasil dari uji normalitas dengan menggunakan normal probability plot dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1

Grafik normal P-P Plot

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan gambar grafik normal P-P Plot di atas, menunjukkan bahwa data yang ada menyebar mengikuti arah garis diagonal dan menyebar mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi berdistribusi normal dan data yang telah diolah telah memenuhi uji asumsi normalitas data. Uji normalitas juga dapat dilihat melalui uji statistik non-parametrik *Kolmogrov-Smirnov*. Menurut Ghazali (2011) sebuah data dapat dinyatakan terdistribusi normal jika nilai *Asymp. Sig.* > 0,05. Apabila nilai *Asymp. Sig.* < 0,05

maka dapat dinyatakan jika data tidak terdistribusi secara normal. Berikut adalah hasil uji normalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov*:

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		140
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,44495095
Most Extreme Differences	Absolute	0,075
	Positive	0,067
	Negatif	-0,075
Test Statistik		0,075
Asymp. Sig. (2-tailed)		,073 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji normalitas data dengan *Kormogorov-Smirnov* pada Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. adalah sebesar $0,073 > 0,05$ yang artinya *Leverage*, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah telah terdistribusi secara normal dan memenuhi syarat normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah uji yang digunakan untuk menunjukkan apakah dalam suatu model regresi terdapat adanya kolerasi atau tidak pada setiap variabel independen. Tidak terjadinya multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai *Tolerance* (TOL) dan *Variance Inflation Factor* (VIF) dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Model regresi yang bebas dari multikolinearitas jika nilai $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,10$ sedangkan jika nilai $VIF > 10$ dan nilai *tolerance* $< 0,10$ maka akan terjadi multikolinieritas (Ghozali, 2016). Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas:

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1		
	(Constant)	
	LEV	0,997
	DP	0,426
	BM	0,427

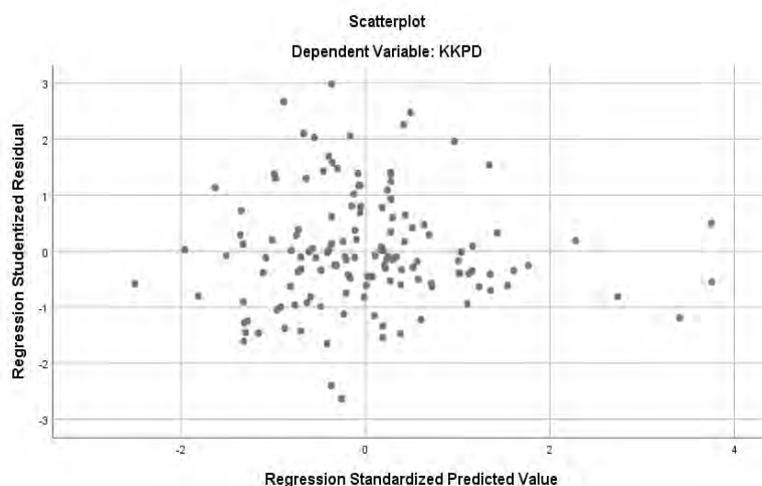
a. Dependent Variable: KKPD

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada Tabel 3, menunjukkan bahwa pada masing-masing variabel independen tidak terjadi gejala multikolinieritas. Hal ini dapat dilihat dari hasil *tolerance* lebih besar dari 0,10 dan hasil VIF lebih kecil dari 10. Sehingga dapat disimpulkan jika model regresi dalam penelitian ini dapat terdistribusi secara normal dan tidak mengalami gejala multikolinieritas antar variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah uji yang bertujuan untuk menguji terjadinya perbedaan model regresi antara varian dari suatu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah model yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati hasil *scatterplot*. Berikut merupakan hasil analisis uji heteroskedastisitas:



Gambar 2
Grafik Scatterplot
Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil analisis uji heteroskedastisitas pada gambar 4, terlihat bahwa terdapat titik-titik yang menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi dan telah memenuhi asumsi uji heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan uji yang bertujuan untuk apakah pada model regresi linier berganda terdapat korelasi antara kesalahan pengguna pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2016). Pada penelitian ini menggunakan uji *Durbin-Watson* (DW) untuk menguji apakah data yang telah dianalisis terjadi autokorelasi atau tidak. Jika nilai DW < -2 maka akan terjadi autokorelasi positif. Jika nilai DW berada diantara -2 sampai $+2$ ($-2 < DW < +2$) maka tidak terjadi autokorelasi. Dan jika nilai DW $> +2$ maka akan terjadi autokorelasi negatif. Berikut merupakan hasil pengujian autokorelasi dengan uji *Durbin-Watson*:

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,334 ^a	0,321	0,114	0,19793	1,967

a. Predictors: (Constant), BM, LEV, DP

b. Dependent Variable: KKPD

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada Tabel 4 menunjukkan nilai *Durbin-Watson* sebesar 1,967 yang berarti berada diantara -2 sampai +2. Sehingga dapat nilai *Durbin-Watson* dapat dinyatakan $-2 < 1,967 < +2$. Maka dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi atau terbebas dari autokorelasi.

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda bertujuan untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yang menunjukkan memiliki hubungan positif atau negatif. Sehingga analisis regresi linier berganda pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui mengenai pengaruh *leverage*, dana perimbangan, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Berikut adalah hasil analisis regresi linier berganda:

Tabel 5
Hasil Analisis Regresi Linear Berganda
Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,835	1,131		0,562	0,575
LEV	0,581	1,972	0,221	0,242	0,809
DP	0,673	0,616	0,243	1,093	0,028
BM	0,504	0,439	0,350	1,147	0,254

a. Dependent Variabel: KKPD

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan pada Tabel 5 maka diperoleh persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini sebagai berikut:

$$KKPD = 0,835 + 0,581 LEV + 0,673 DP + 0,504 BM + e$$

Dari interpretasi dalam model regresi di atas dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Nilai konstanta sebesar 0,835 yang berarti jika variabel independen sama dengan 0, maka nilai kinerja keuangan pemerintah daerah sebesar 0,835.. (2) Nilai koefisien regresi *Leverage* (LEV) yaitu sebesar 0,581 yang berarti menunjukkan arah positif (searah) antara LEV dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD). Dengan demikian apabila LEV mengalami peningkatan maka akan diikuti pula dengan meningkatnya KKPD sebesar 0,581. Sehingga dapat disimpulkan jika semakin besar LEV yang dihasilkan maka KKPD juga akan mengalami peningkatan. (3) Nilai koefisien regresi Dana Perimbangan (DP) yaitu sebesar 0,673 yang berarti menunjukkan arah positif (searah) antara DP dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD). Dengan demikian apabila DP mengalami peningkatan maka akan diikuti pula dengan meningkatnya KKPD sebesar 0,673. Sehingga dapat disimpulkan jika semakin besar DP yang dihasilkan maka KKPD juga akan mengalami peningkatan. (4) Nilai koefisien regresi Belanja Modal (BM) yaitu sebesar 0,504 yang berarti menunjukkan arah positif (searah) antara BM dengan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD). Dengan demikian apabila BM mengalami peningkatan maka akan diikuti pula dengan meningkatnya KKPD sebesar 0,504. Sehingga dapat disimpulkan jika semakin besar BM yang dihasilkan maka KKPD juga akan mengalami peningkatan.

Uji Hipotesis

Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji F adalah uji yang digunakan untuk mengukur apakah suatu variabel independen layak digunakan dalam suatu penelitian atau tidak. Pada penelitian ini variabel independen yang digunakan adalah *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio*, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal. Menurut Ghozali (2006) apabila hasil nilai signifikan $< 0,05$ maka dapat disimpulkan jika variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dan begitu sebaliknya, apabila hasil nilai signifikan $> 0,05$ maka secara simultan variabel independen tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji F dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6
Hasil Uji Kelayakan Model
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,052	3	0,017	15,491	.000 ^b
	Residual	4,752	136	0,035		
	Total	4,804	139			

a. Dependent Variabel: KKPD

b. Predictors: (Constant), BM, LEV, DP

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji kelayakan model pada Tabel 8 menunjukkan bahwa hasil F hitung sebesar 15,491 dengan nilai signifikan yang dihasilkan 0,000 yang berarti nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen dalam penelitian ini yaitu *Leverage* (LEV), Dana Perimbangan (DP), dan Belanja Modal (BM) secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (KKPD).

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji determinasi (R²) adalah uji yang digunakan sebagai tolak ukur untuk melihat sejauh mana variabel dependen mempengaruhi variabel dependen. Jika nilai koefisien determinasi (R²) mendekati angka 100% maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sangat kuat pengaruhnya. Begitu pula sebaliknya, jika nilai koefisien determinasi (R²) mendekati angka 0 maka semakin lemah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut hasil pengujian koefisien determinasi (R²) yang tertera pada Tabel 7.

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R Square)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,334 ^a	0,321	0,114	0,19793

a. Predictors: (Constant), BM, LEV, DP

b. Dependent Variabel: KKPD

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R²) menunjukkan bahwa *R-Square* memiliki nilai sebesar 0,321 yang dapat menjelaskan bahwa variabel *leverage*, dana perimbangan dan belanja modal memiliki kontribusi sebesar 32% terhadap variabel kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 68% dapat diasumsikan dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Uji t

Uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Jika nilai signifikansi memiliki nilai $< 0,05$ maka dapat disimpulkan terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Namun jika nilai signifikansi memiliki nilai $> 0,05$ maka dapat disimpulkan tidak ada pengaruh yang signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berikut hasil pengujian uji t disajikan dalam Tabel 8.

Tabel 8
Hasil Uji t
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,835	1,131		0,562	0,575
	LEV	0,581	1,972	0,221	0,242	0,809
	DP	0,673	0,616	0,243	1,093	0,028
	BM	0,504	0,439	0,350	1,147	0,254

a. Dependent Variabel: KKPD

Sumber: Data sekunder diolah, 2021

Pembahasan

Pengaruh *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui pengujian regresi tersebut diperoleh nilai koefisien regresi positif sebesar 0,581 dengan nilai signifikan sebesar 0,809 $> 0,05$. Sehingga dapat diartikan hubungan antara LEV dengan kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan yang positif. Namun variabel LEV tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, karena memiliki nilai signifikan yang $> 0,05$. Hasil penelitian tersebut dapat diartikan bahwa jika *leverage* mengalami perubahan kenaikan ataupun penurunan pada suatu pemerintah daerah tidak akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut disebabkan karena Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur memiliki modal yang cukup besar yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Maka dapat terlihat bahwa Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur memiliki dana internal yang cukup sehingga tidak perlu bergantung pada pinjaman atau utang untuk memenuhi kebutuhan operasionalnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Satria dan Sari (2018), Kusuma (2017), dan Sari (2016) yang menyatakan jika *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Menurut Sari (2016) semakin tinggi *leverage* yang dimiliki suatu pemerintah daerah maka dapat dikatakan semakin buruk kinerja keuangan, karena pemerintah daerah belum mampu membiayai biaya operasionalnya. Namun penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan Sumarjo (2010) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah karena jika suatu entitas memiliki *leverage* yang tinggi maka entitas tersebut akan mendapat pengawasan lebih dari kreditor dengan cara kreditor akan melakukan pengawasan kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah.

Pengaruh Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan uji regresi yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi positif sebesar 0,673 dengan nilai signifikan sebesar 0,028 $< 0,05$. Sehingga dapat diartikan hubungan antara Dana Perimbangan (DP) dengan kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan yang positif. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Anisa (2020) dan Ayu (2018) yang menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap

kinerja keuangan pemerintah daerah. Artinya pemerintah daerah sudah dapat mengelola dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat secara maksimal. Dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat akan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, karena semakin tinggi dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah maka pemerintah daerah akan sulit untuk berkembang dan maju sehingga prinsip otonomi daerah akan sulit untuk dicapai jika pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat.

Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan uji regresi yang telah dilakukan, diperoleh nilai koefisien regresi positif sebesar 0,504 dengan nilai signifikan sebesar $0,254 > 0,05$. Sehingga dapat diartikan hubungan antara Belanja Modal (BM) dengan kinerja keuangan pemerintah daerah memiliki hubungan yang positif. Namun variabel BM tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, karena memiliki nilai signifikan yang $> 0,05$. Hal tersebut dapat dikarenakan pemerintah daerah masih belum mampu mengelola penerimaan belanja modal dengan optimal. Belanja modal yang seharusnya dapat digunakan pemerintah daerah untuk menambah aset dan memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun seharusnya dapat dialokasikan untuk sarana dan prasarana masyarakat agar kualitas pelayanan publik semakin meningkat. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Darwanis dan Saputra (2014) yang menyatakan bahwa belanja modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andrifa *et al.*, (2017) dan Muhayanah (2016) yang menyatakan belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui tahap pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 26 dan pengujian hipotesis mengenai pengaruh *Leverage* (LEV), Dana Perimbangan (DP), dan Belanja Modal (BM) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kota/Kabupaten yang berada di provinsi Jawa Timur selama periode 2016-2019 dapat memiliki kesimpulan sebagai berikut: (1) *Leverage* (LEV) tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur memiliki modal yang cukup besar yang dimiliki oleh masing-masing daerah, (2) Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan semakin tinggi dana perimbangan yang diterima pemerintah daerah maka pemerintah daerah akan sulit untuk berkembang dan maju sehingga prinsip otonomi daerah akan sulit untuk dicapai jika pemerintah daerah masih bergantung pada pemerintah pusat, (3) Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena pemerintah daerah masih belum mampu mengelola penerimaan belanja modal dengan optimal dan penggunaan belanja modal oleh pemerintah daerah digunakan untuk kegiatan yang bersifat konsumtif..

Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terdapat beberapa keterbatasan yang dialami oleh peneliti dan memerlukan perbaikan bagi penelitian selanjutnya, antara lain: (1) Populasi yang digunakan dalam penelitian ini hanya meliputi 35 Kabupaten/Kota dari 38 Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur. Hal tersebut disebabkan karena tiga Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Jawa Timur tidak mempublikasikan laporan kinerja pemerintah daerahnya secara 4 tahun berturut-turut, (2) Data yang diperoleh pada penelitian ini hanya pada periode 2016 - 2019 dikarenakan tidak mendapatkan laporan keuangan

pemerintah daerah dari pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) jika mengajukan permintaan data lebih dari 4 tahun.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: (1) Bagi Peneliti selanjutnya diharap dapat menambah Kabupaten/Kota yang terdapat di Indonesia untuk dijadikan objek penelitian. Peneliti selanjutnya juga dapat menggunakan indikator rasio kinerja keuangan pemerintah daerah yang lain seperti rasio efektivitas, rasio kemandirian, rasio efisiensi, dan yang lain sebagainya, (2) Bagi pemerintah daerah diharapkan agar dapat meningkatkan kembali Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) guna menunjang pengoptimalan pengelolaan pendapatan daerah dan pemanfaatan aset daerah agar penerimaan retribusi semakin maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Andirfa, M., H. Basri, dan M. S. A. Majid. 2016. Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Magister Akuntansi* 5 (3), 30-38.
- Adhana, D. 2019. Pengaruh Belanja Modal, Investasi Pemerintah, dan Pembayaran Utang Pemerintah Daerah Terhadap *Flypaper Effect* Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan. *Thesis*. Politeknik Negeri Sriwijaya.
- Anisa, B. C. 2020. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan *Leverage* Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. *Artikel Ilmiah*. Program Studi Akuntansi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Antari, N. G. dan I. B. P. Sedana. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Journal Manajemen Unud* 7 (2), 1080-1110.
- Astiti, D.N.Y dan N. P. S. H. Mimba. 2016. Pengaruh Belanja Rutin dan Belanja Modal pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14 (3). 1924-1950.
- Ayu, P. P. 2018. Analisis PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemda Se-Jawa Barat. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomi* 3 (1). 80-96.
- Darise, N. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah*. PT. Indeks. Jakarta.
- Darwanis dan R. Saputra. 2014. Pengaruh Belanja Modal terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Dampaknya pada Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis* 1 (2). 183-199.
- Fahmi, Irham. 2012. *Analisis Kinerja Keuangan*. Alfabeta. Bandung.
- Fitriyanti, Avrilia. 2016. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, Retribusi Perizinan Tertentu, dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Bintan Periode 2010-2014. *Jurnal Umrah*. 1-19.
- Ghozali, I. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi Ke 4. Badan Penerbit _____ . 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23*. Edisi Kedelapan. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jakarta.
- _____. 2008. *Akuntansi Sektor Publik*. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Tiga. Salemba Empat. Jakarta.
- Halim, A. dan M. S. Kusufi. 2012. *Akuntansi Sektor Publik*. Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Empat. Salemba Empat. Jakarta.

- Julitawati, E. Darwanis. dan Jalaludin. 2012. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syah Kuala Banda Aceh* 1 (1). 15-29.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah*. Erlangga. Jakarta.
- Kusuma, A. R. 2017. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* 6 (1). 403-420.
- Kusumawardani, Media. 2012. Pengaruh *Size*, Kemakmuran, Ukuran Legislatif, *Leverage*, terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi UNNES. Semarang.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mahsun, M., F. Sulistyowati, dan H. A. Purwanugraha. 2011. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Ketiga*. BPF. Yogyakarta.
- Muhaynah, F. A. 2016. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2013. *Publikasi Ilmiah*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Surakarta.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan*.
- Perwitasari, Citra. 2010. The Influence of Financial Performance to the Level of Accountability Disclosure of Indonesia's Local Government. *Tesis*. Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Sari, I. P. 2016. Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan, dan Ukuran Legislatif terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Kab/Kota Pulau Sumatra). *JOM Fekon* 3 (1), 679-692.
- Sari, R. N. 2017. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013-2015. *Simki-Economic* 1 (11). 1-12.
- Satria, D. I. dan H. P. Sari. 2018. Pengaruh *Wealth*, *Intergovernmental Revenue*, *Leverage*, dan Opini Audit BPK terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Lhokseumawe). *At-Tasyri* 10 (1). 9-21.
- Sucipto. 2007. Penilaian Kinerja Keuangan. *Jurnal Akuntansi Universitas Sumatra Utara*. Medan.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- _____. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sumarjo, Hendro. 2010. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Supriyono, R, 2018. *Akuntansi Keperilakuan*. Gadjah Mada University Pres. Yogyakarta.